

Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan

Ira Julistia¹, Erlin Kurniati²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung

Email: erlinkurniati@radenintan.ac.id

Citation: Julistia, I., & Kurniati, E. (2024). Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 4(3), 222–230. <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/301>

Received: 1 Mei 2024

Accepted: 23 Mei 2024

Published: 31 Mei 2024

Publisher's Note: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2024 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS), Magetan, Indonesia. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

[\(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Abstract.

This research aims to describe the role of community government in the development of Titiwangi Village, Candipuro District, South Lampung Regency, and the supporting and inhibiting factors. This study used a descriptive qualitative method. The informants in this research ranged from the Village Head (as a key informant), Village Officials, Hamlet Heads, BPD, and Karang Taruna, to the general public. The data collection technique was carried out using triangulation (combination), data analysis was inductive, and qualitative research results emphasized meaning rather than generalization. The research results show that the role of the government community in the development of Titiwangi Village is quite good and balanced. The collaboration that occurs is mutualistic in nature where the parties involved understand each other's position and role in village development. The village government plays a role in facilitating the community and providing good direction to the community regarding the development goals that will be implemented. The community plays a role in contributing thoughts, energy, and property for the success of development. Meanwhile, the supporting factor for government-community cooperation is the humane approach taken by the village government towards society, and the community itself has a good understanding of its position and role in development. Apart from that, the inhibiting factors are the lack of public awareness of environmental cleanliness and the government's continued assumption that the community is subordinate and the object of development supervision.

Keywords: Government, Society, Development.

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah masyarakat dalam pembangunan Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan serta bagaimana faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini mulai Kepala Desa (sebagai key informan), Perangkat Desa, Kepala Dusun, BPD,

Karang Taruna, hingga masyarakat umum. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Titiwangi cukup baik dan seimbang. Kerjasama yang terjadi bersifat mutualistik dimana pihak yang terlibat saling memahami posisi dan perannya dalam pembangunan desa. Pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan. Masyarakat berperan dalam menyumbangkan pemikiran, tenaga, hingga harta benda untuk demi keberhasilan pembangunan. Sedangkan, faktor pendukung kerjasama pemerintah-masyarakat adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah desa terhadap masyarakat manusiawi, dan masyarakat sendiri telah memahami dengan baik posisi dan perannya dalam pembangunan. Selain itu, faktor penghambatnya adalah minimnya kesadaran masyarakat pada kebersihan lingkungan serta masih adanya anggapan pemerintah bahwa masyarakat adalah bawahan dan objek dalam pengawasan pembangunan.

Kata Kunci: Pemerintah, masyarakat, pembangunan.

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan tingkat kesenjangan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa prioritas dari pembangunan adalah menghapuskan kemiskinan. Jika dilihat dari penurunan angka kemiskinan, Kabupaten Lampung Selatan dapat dibilang telah mampu (setidaknya telah berupaya) mewujudkan tujuan utama pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari data BPS Kabupaten Lampung Selatan yang menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan dari tahun 2022 sebanyak 13,4% menurun menjadi 12,79% pada tahun 2023.

Penurunan angka kemiskinan bukanlah satu-satunya indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ada berbagai faktor lain yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. kesejahteraan masyarakat dapat dinilai dari indikator seperti berikut: a) tercapainya swasembada (kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan, pendidikan dasar, keamanan, dan sebagainya; b) peningkatan harga diri (berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain); c) diperolehnya kebebasan untuk mengembangkan usaha memperbaiki mutu hidup tanpa adanya

tekanan dari pihak lain. Artinya penurunan angka kemiskinan hanya berarti tercapainya satu poin indikator kesejahteraan, yakni tercapainya swasembada, dan itupun belum sepenuhnya tercapai.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang utuh, maka dibutuhkan berbagai upaya serius salah satunya dengan menemukan formula paradigma pembangunan yang tepat. Berbagai perubahan paradigma pembangunan pun terjadi. Dari paradigma *production centered development* yang lebih menekankan adanya perubahan-perubahan fisik dan pencapaian kebutuhan dasar tanpa mempedulikan apakah pencapaian tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak, hingga paradigma pembangunan yang berbasis masyarakat (*people-oriented development*) yang menuntut adanya kerjasama dan keseimbangan peran yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Keseimbangan peran dan posisi sangat menentukan ketercapaian kesejahteraan masyarakat secara utuh. Sebagaimana pandangan Tjokroamidjojo (1982:19) yang menganggap bahwa tujuan pembangunan dapat tercapai jika melibatkan seluruh masyarakat dalam suatu negara. Masyarakat harus mempunyai porsi peran dan posisi yang seimbang dengan pemerintah. Masyarakat bukan hanya dijadikan objek pembangunan, melainkan juga pelaku pembangunan. Sebagai contoh, masyarakat bisa saja mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan hingga pemukiman dengan adanya program pembangunan. Namun, dengan kemampuan tersebut apakah masyarakat mampu untuk hidup lebih berkembang atau justru tergantung pada program pembangunan? Maka, masyarakat harus didorong untuk menjadi pelaku utama dalam pembangunan, sekaligus penikmat hasil pembangunan. Harus ada pembagian peran yang seimbang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara utuh.

Jika hanya dilihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, Kemampuan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan untuk memenuhi kebutuhan dasar relatif baik. Data penurunan angka kemiskinan di awal tadi lebih dari cukup untuk menjelaskan premis tersebut. Pembangunan fisik Kabupaten Lampung Selatan cukup berkembang. Demikian pula pembangunan di Desa Titiwangi. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan fasilitas umum mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Di Desa Titiwangi terdapat 1-unit Puskesmas, Polindes, Praktek Bidan, serta Posyandu (sebanyak 6 unit), 1-unit sekolah tingkat menengah pertama dan atas, 3 unit sekolah tingkat dasar, hingga 1 unit pasar desa (Monografi Desa Titiwangi: 2024).

Namun, sebagaimana penjelasan di awal, berbagai kelengkapan fasilitas dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, belum cukup untuk menilai bahwa kesejahteraan masyarakat Desa Titiwangi telah tercapai. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan? Serta bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan? Sedangkan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah masyarakat dalam pembangunan Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan serta bagaimana faktor pendukung dan penghambatnya.

Pemerintah

Awaloedin dalam Tjokroamidjojo (1995:18) mengklasifikasikan berbagai peran pemerintah ke dalam tiga kelompok, yakni: (1) Fungsi pengaturan, dalam hal ini dapat berupa penentuan kebijakan, pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perijinan, serta pengawasan; (2) Pemilik sendiri dari usaha-usaha ekonomi atau sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau swasta; (3) Penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan

ekonomi atau social. lebih mengerucutkan peran pemerintah desa dalam pembangunan yaitu sebagai penyampai pesan pembangunan, pengarah masyarakat untuk berpartisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat. Peranan tersebut sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran pemimpin secara umum meliputi peran sebagai pelopor, inovator, fasilitator, stabilitator, sekaligus mediator bagi berbagai kepentingan warga yang dipimpinnnya. Kaitannya dengan pembangunan, peran- peran tersebut harus saling berkesinambungan. Artinya, seorang pemimpin harus menjalankan berbagai peran tersebut sesuai konteksnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga saat evaluasi pembangunan.

Masyarakat

Peran masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan dari kelompok yang berpengaruh. Sedangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan telah tercantum secara konstitusional dalam peraturan perundangan. Peran serta masyarakat ini merupakan kemitraan diantara para stakeholder khususnya pemerintah, swasta dan masyarakat dalam proses pembangunan yang dikenal dengan konsep “Public Private Partnership”. Hal yang paling mendasar yang perlu dilakukan untuk mencapai konsep tersebut adalah perlu dilakukan pengambilan kekuatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan.

Pembangunan

Pembangunan sejatinya bukanlah fenomena materi (fisik) semata, pembangunan harus melampaui sisi materi dari kehidupan manusia. Todaro (2000: 20) mengungkapkan pandangan bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, dilaksanakan secara bertahap dan berencana yang berorientasi pada suatu pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan, baik lahiriah maupun batiniah. Siagian (2012: 57-127) dalam bukunya administrasi pembangunan menjelaskan bahwa bentuk-bentuk pembangunan bukan hanya fisik saja, namun mencakup hampir semua bidang diantaranya: politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Dengan memilih lokasi penelitian di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, fokus penelitian ini adalah peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Titiwangi menunjukkan bahwa pembangunan di desa tersebut cukup baik. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian.

No	Jenis Pembangunan	Sumber Dana	Keterangan
A. Pembangunan Fisik			
1	Pembuatan dan Perbaikan Jalan: -Jalan Beton -Jalan Aspal	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, DAD, Block Grand, PNPB	Terlaksana

2	Pavingisasi dan Penerangan Jalan	PNPM, APBD	Terlaksana
		Provinsi, Block	
		Grand, DAD,	
		APBDes	
3	Penataan Lingkungan:	PNPM, DAD	Terlaksana
	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman Daun Kelor • Pengadaan Keran Air (air mengalir depan rumah untuksebelum masuk rumah dalam keadaan bersih) • Pengadaan Bak Sampah • Pembangunan Pos Keamanan lingkungan 		

Dari teknik tersebut, didapat beberapa informan mulai Kepala Desa (sebagai key informan), Perangkat Desa, Kepala Dusun serta RT hingga masyarakat umum. Untuk mendapat data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara informan. Data-data yang telah terkumpul menggunakan teknik reduksi data (pemilihan dan pengelompokan data), penyajian data (membandingkan data di lapangan dengan teori), dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa pembangunan Desa Titiwangi cukup baik. Dari pembangunan fisik hingga non-fisik hampir semua terlaksana. Pembangunan fisik Desa Titiwangi lebih ditekankan pada progam pembangunan dan perbaikan jalan dan penataan lingkungan seperti normalisasi sungai, pembuatan drainase, pengelolaan sampah, hingga pavingisasi. Sedangkan pembangunan non-fisik lebih ditekankan pada pelestarian kebudayaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Penjelasan lebih rinci mengenai pelaksanaan pembangunan Desa Titiwangi dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini:

Tabel 1. Pembangunan di Desa Titiwangi

B. Pembangunan Non Fisik			
1	Posyandu	DAD	Terlaksana
2	Penyantuan fakir Miskin dan yatim Piatu	DAD, Swadaya Masyarakat	Terlaksana
3	Pengobatan gratis	DAD	Terlaksana
4	Penyemprotan demam berdarah	DAD	Terlaksana
5	Kegiatan Senam	DAD	Terlaksana
6	Jamkesmas	DAD	Terlaksana

Sumber: Sekretaris Desa Titiwangi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sumber dana pembangunan desa tidak hanya berasal dari pemerintah, namun juga dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mempunyai inisiatif untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Sumari selaku Kepala Desa Titiwangi dalam wawancara pada tanggal 10 April 2024, bahwa masyarakat Desa Titiwangi telah cukup mempunyai inisiatif untuk merancang, melaksanakan, hingga mengawasi sendiri proses pembangunan yang hasilnya nanti untuk dinikmati bersama.

Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Peran Pemerintah dalam perencanaan pembangunan desa harus dimiliki oleh seorang pemimpin yakni sebagai penentu arah, wakil dan juru bicara organisasi, komunikator yang efektif, mediator, hingga integrator. Dalam pembangunan Desa Titiwangi, peran Pemerintah dapat terlihat mulai dari tahap perencanaan pembangunan. Pemerintah Desa memfasilitasi warga untuk melakukan berbagai pertemuan dari tingkat RT hingga tingkat Desa. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat.

Dari berbagai permasalahan masyarakat yang terkumpul, pemerintah melakukan pengkajian sehingga didapat peta permasalahan. Disini peran pemerintah sebagai penentu arah mulai terlihat jelas. Dari peta permasalahan tersebut Pemerintah Desa Titiwangi memberikan poin-poin masalah yang sebaiknya diprioritaskan. Poin tersebut nantinya dijadikan untuk pedoman arah pembangunan.

Pada tahap selanjutnya, pemerintah melakukan koordinasi dengan masyarakat untuk menentukan skala prioritas pembangunan melalui pertemuan tingkat desa, yakni Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Dalam proses koordinasi tersebut, pemerintah berperan sebagai wakil dan juru bicara organisasi, dalam hal ini Desa Titiwangi. Sebagai wakil dan juru bicara desa, pemerintah dituntut untuk menyampaikan pesan pembangunan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Untuk itu, pemerintah desa juga harus berperan sebagai komunikator yang efektif.

Dalam musyawarah tersebut, masyarakat mempunyai keleluasaan untuk menyampaikan pendapat dalam pembangunan masyarakat bisa berperan untuk menyumbangkan pemikiran. Kenyataan yang terjadi di Desa Titiwangi, permasalahan seringkali muncul dalam tahap penentuan skala prioritas ini. Salah satunya adalah ketidaksamaan pandangan tentang pesan pembangunan yang disampaikan oleh pemerintah desa. Contohnya, di satu pihak memandang bahwa pavingisasi lebih mendesak untuk dilaksanakan, sementara di pihak lain menganggap normalisasi sungai-lah yang lebih penting. Akibatnya perdebatan terjadi, semua pihak merasa mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapat.

Agar permasalahan tidak meluas, maka pemerintah sangat dibutuhkan perannya untuk menengahi konflik (mediator). Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, didapatkan inti bahwa Pemerintah Desa Titiwangi beranggapan bahwa perumusan kebijakan merupakan inti dari kebijakan itu sendiri. Atau, dalam bahasa pembangunan dapat diterjemahkan secara bebas bahwa perencanaan pembangunan merupakan inti dari pembangunan itu sendiri. Jadi, setiap permasalahan yang terjadi dalam proses perencanaan pembangunan, Pemerintah Desa Titiwangi berusaha untuk menyelesaikan sebaik mungkin agar konflik tidak meluas ke tahap selanjutnya dan proses pelaksanaan pembangunan berjalan lancar. Dalam menengahi konflik, tentu dibutuhkan komunikasi yang efektif. Pemerintah Desa Titiwangi melakukan pendekatan manusiawi pada pihak-pihak yang berkonflik salah satunya dengan mengunjungi rumahnya. Dengan begitu, masyarakat (pihak yang berkonflik) merasa diperhatikan dengan baik sehingga pemerintah tidak mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan kembali pihak yang berkonflik tersebut.

Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Setelah semua permasalahan yang terjadi dalam perencanaan pembangunan dapat diatasi, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Masyarakat membuat proposal pengajuan dana sesuai skala prioritas dan perencanaan yang telah ditentukan bersama. Pemerintah disini berperan sebagai regulator yang menyetujui proposal pengajuan dana dari masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai suplaier yang memberikan dana pembangunan agar dapat dikelola masyarakat. Jadi dalam pelaksanaan pembangunan, peran masyarakat terlihat lebih jelas. Masyarakat berperan mulai dari memberikan tenaga hingga harta benda. Inisiatif masyarakat diantaranya adalah ikut serta membuat pondasi jalan, memberikan makanan dan minuman untuk tukang, hingga menyisihkan sebagian uang untuk menutupi kekurangan dana pembangunan. Kekurangan dana terjadi karena berbagai sebab, terutama oleh pembengkakan anggaran akibat salah memperhitungkan estimasi belanja. Disini pemerintah

berperan untuk memberikan masukan-masukan dan arahan bagaimana cara menutupi kekurangan dana. Dalam perspektif Arifin peran ini termasuk peran pemerintah sebagai penentu arah. Selain itu, pemerintah juga berperan untuk melakukan pendekatan pada para pengusaha agar mau menutupi kekurangan dana.

Peran ini termasuk peran pemerintah sebagai juru bicara organisasi. Peran pemerintah-masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa Titiwangi cukup seimbang. Kerjasama yang terjadi lebih bersifat mutualistik. Pemerintah menyadari bahwa setiap proses pembangunan akan selalu membutuhkan keterlibatan masyarakat. Pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan proses pembangunan. Sedangkan masyarakat memahami posisi dan perannya dalam pembangunan desa. Masyarakat telah menyadari arti penting keterlibatan mereka untuk menentukan hingga mengawasi proses pembangunan. Artinya, kedua belah pihak mempunyai kesamaan visi sehingga saling mendukung satu sama lain dan saling mendapatkan manfaat yang seimbang.

Faktor Pendukung dan Penghambat kerjasama Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Di Desa Titiwangi Faktor pendukung dari pihak Pemerintah Desa dalam kerjasama tersebut dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

Pemerintah sebagai fasilitator dan koordinator melakukan pendekatan pada masyarakat dengan memfasilitasi pertemuan-pertemuan antar warga. Pemerintah Desa menghadiri langsung pertemuan-pertemuan dari level RT tersebut sehingga masyarakat merasa bahwa pertemuan tersebut memang sangat penting;

Pemerintah Desa melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang bertentangan dengan mengunjungi rumahnya. Pendekatan seperti ini membuat masyarakat lebih mudah menyadari arti penting kesamaan visi-misi demi kebaikan bersama;

Dalam membuat peraturan, Pemerintah Desa memberikan fasilitas untuk menjalankan aturan tersebut. Hal ini membuat masyarakat lebih mudah untuk mentaati aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama;

Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Desa memberikan porsi lebih banyak kepada masyarakat untuk berperan. Hal ini membuat masyarakat merasa diperhatikan dan dilibatkan secara penuh. Dalam temuan disebutkan, dengan memberikan porsi yang lebih besar tersebut, masyarakat terdorong untuk melakukan pembangunan dengan sebaik baiknya karena merasa dimanusiakan. Dorongan seperti ini dalam teori organisasi disebut pemberian reward and punishment untuk memotivasi anggota organisasi. Motivasi berupa penghargaan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian wewenang tersebut membuat masyarakat merasa dihargai oleh Pemerintah Desa.

Pendekatan dalam pembangunan nonfisik yang dilakukan Pemerintah desa Titiwangi sangat baik salah satunya dengan mengadakan berbagai acara kebudayaan yang bertujuan untuk mempererat persaudaraan masyarakat sehingga pembangunan berjalan dengan baik karena kekompakan tersebut. Sedangkan faktor penghambat dalam kerjasama pemerintah-masyarakat dalam pembangunan desa adalah adanya pihak-pihak dari masyarakat yang teguh pada pemikirannya dalam penentuan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, dalam hal kebersihan lingkungan dalam temuan disebutkan bahwa meski tempat sampah sudah banyak disediakan namun kebersihan lingkungan masih belum sepenuhnya baik. Selain itu, inisiatif masyarakat untuk mengolah sampah masih sangat kurang. Masyarakat lebih memilih membuang sampah daripada mengolahnya, kesadaran masyarakat masih minim.

Sedangkan faktor penghambat dari pihak pemerintah lebih kepada paradigma pemerintah sendiri yang sedikit banyak masih terpengaruh paradigma lama bahwa masyarakat merupakan objek pembangunan. Meski tidak penuh, paradigma ini terlihat dalam pengawasan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa Titiwangi dimana masyarakat lebih cenderung dipandang sebagai bawahan untuk menerima arahan Pemerintah Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan. Selain itu, koordinasi Pemerintah Desa dalam hal pengolahan sampah masih belum maksimal membuat beberapa pihak masih belum terintegrasi dengan baik dalam mengolah sampah di tempat pembuangan sampah desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Titiwangi cukup baik dan seimbang. Kerjasama yang terjadi bersifat mutualistik dimana pihak yang terlibat saling memahami posisi dan perannya dalam pembangunan desa. Pihak yang terlibat menyadari substansi kerjasama yang dilakukan tersebut. Pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan. Masyarakat berperan dalam menyumbangkan pemikiran, tenaga, hingga harta benda untuk demi keberhasilan pembangunan. Masyarakat menyadari arti penting pembangunan bagi mereka.

Faktor pendukung kerjasama pemerintah-masyarakat adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah desa terhadap masyarakat manusiawi, dan masyarakat sendiri telah memahami dengan baik posisi dan perannya dalam pembangunan. Faktor penghambatnya adalah minimnya kesadaran masyarakat pada kebersihan lingkungan serta masih adanya anggapan pemerintah bahwa masyarakat adalah bawahan dan objek dalam pengawasan pembangunan.

Diharapkan Pemerintah Desa Titiwangi dalam bekerjasama dengan masyarakat untuk pembangunan desa terus dipertahankan dan semakin dikembangkan. Apa yang telah dicapai Pemerintah Desa bersama masyarakat Desa Titiwangi terutama dalam pengolahan sampah sebaiknya dijadikan wacana dan tindak lanjut terutama bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk mewujudkan gagasan pengolahan sampah desa. Mengingat mayoritas desa di Kabupaten Lampung Selatan menurut pengamatan penulis masih belum mempunyai visi yang baik dalam mengolah sampah.

Diharapkan agar Pemerintah Desa Titiwangi menjadikan masyarakat sebagai mitra utama dalam pengawasan pembangunan dengan memberikan porsi yang lebih banyak dalam melakukan pengawasan secara mandiri. Sedangkan dalam pengolahan sampah, diharapkan Pemerintah Desa Titiwangi lebih gencar melakukan dorongan dan pendekatan kepada masyarakat serta lebih intens dalam mengintegrasikan semua pihak dalam menangani masalah pengolahan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul. (2012). *Leadership: Ilmu dan Seni Kepemimpinan*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Hadari, Nawawi. (2007). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardjosoemantri, K. (1986). *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Laksana, Nuring Septyasa. (2013). *Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Progam Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik: Volume 1, Nomor 1*.

- Marini, Tety. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN BERAU" 12 (2016).
- Nugroho, Riant. (2011). Public Policy. Jakarta: PT. Gremedia
- Prasojo, Rizky A., and Luluk Fauziah. "Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo." JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) 3, no. 1 (March 31, 2015): 49–64.
- Redaksi, Alamat. "BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL YOGYAKARTA," no. 6 (2008).
- Siagian, P. Sondang. (2012). Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media.
- Theresia, Aprillia, dkk. (2014). Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Tjokroamidjojo. (1982). Teori dan Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta: Penerbit Gunung Agung
- Todoaro, Michael P. (2000). Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga
<https://lampungselatankab.bps.go.id/>